

PROBLEMA DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN JOHAR BARU - JAKARTA PUSAT

PROBLEM AND SOCIAL CONFLICT RESOLUTION IN JOHAR BARU DISTRICT – CENTRE JAKARTA

Setyo Sumarno

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No. 200 Cawang III – Jakarta Timur
E-mail: setyosumarno@rocketmail.com

Diterima: 28 Maret 2014, Direvisi: 11 April 2014, Disetujui: 28 April 2014

ABSTRACT

Social conflicts in the community in terms of quantity and quality tends to increase. Loss of property and even lives are invaluable, as a result of social conflict in various regions in Indonesia. In Jakarta, there is a conflict-prone areas, the District Johar Baru, which in this district Has quite often among the community groups. This lead the research, with the aim of obtaining information environment, and the root causes of conflict among communities, and what solutions have been carried out in the handling of the conflict. data and information have been collected from various parties, both from officers, government officials, community leaders and community members involved in the conflict. Information from community leaders, that the sources of conflict include: seizure of land, the influence of drugs, unemployment, and the demand for food and population density. Efforts have been made through the establishment of local residents Early Public Vigilance Forum (FKDM), Community Awareness Group (Pokdarmas), Forum Against violence and brawl (Fact), Anti brawl Citizens Forum (Fatwa), and safe village community (SVC). The institutional existence need to be optimized with the support of the government and the Jakarta Government. Then it should also be empowered and utilized and Resource Potential of Social Welfare, so as to provide a solution to social reconciliation permanently.

Keywords: *Social conflict, social resolution, social harmony.*

ABSTRAK

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat secara kuantitas maupun kualitasnya cenderung semakin meningkat. Kerugian harta benda dan bahkan nyawa tidak ternilai, sebagai akibat dari konflik sosial dengan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Di Jakarta, ada satu wilayah yang rawan konflik, yaitu Kecamatan Johar Baru, dimana di kecamatan ini seringkali terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini yang mendorong dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh informasi kondisi lingkungan, akar dan penyebab konflik antar kelompok masyarakat, dan apa solusi yang telah dilakukan dalam penanganan konflik tersebut. Untuk itu dikumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, baik dari unsur aparat, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang terlibat konflik. Informasi dari tokoh masyarakat, bahwa sumber konflik antara lain: rebutan lahan, pengaruh narkoba, pengangguran, dan tuntutan kebutuhan pangan serta kepadatan penduduk. Upaya yang telah dilakukan penduduk lokal melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA). Eksistensi kelembagaan tersebut perlu dioptimalkan dengan dukungan dengan pemerintah pusat maupun Pemda DKI Jakarta. Kemudian perlu juga diberdayakan dan didayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, sehingga mampu memberikan solusi untuk mewujudkan rekonsiliasi sosial secara permanen.

Kata kunci: *Konflik sosial, resolusi sosial, keserasian sosial.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang santun, ramah dan lembut, akhir-akhir ini berubah menjadi masyarakat yang temperamental, mudah marah dan mudah melakukan tindak kekerasan. Ketika menghadapi masalah yang sangat sederhana, warga masyarakat cenderung untuk melakukan penyelesaian dengan cara-cara kekerasan atau anarkis. Diawali dari saling mengejek antar individu, bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial yang melibatkan banyak orang.

Konflik sosial yang terjadi dewasa ini sangat beragam. Mulai dari tawuran antar warga yang dilatarbelakangi isu agama dan pendirian rumah ibadah, suku, ras dan antar etnis, kesenjangan sosial, konflik pada institusi pendidikan, konflik organisasi kemasyarakatan, sengketa lahan, dan akses dari konflik politik. Informasi tersebut di atas tentunya belum termasuk tawuran antar pelajar, tawuran antar kelompok mahasiswa, tawuran antar supporter sepak bola. Akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut tidak hanya kerugian harta benda, tetapi kerusakan pada tatanan dan pranata sosial yang ada bahkan nyawa manusia. Begitu beragamnya konflik, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik itu sendiri (Suradi, 2009, Nuryana dkk, 2005).

Secara umum terjadinya konflik disebabkan oleh tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, disebabkan oleh adanya sikap kurang saling menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan

kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (2010), konflik sosial yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 93 kasus. Meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun jumlah konflik sosial kembali meningkat menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012. Tercatat dari Januari-November 2012 telah terjadi 104 peristiwa konflik dengan 8 pemicu utama konflik yaitu: bentrokan antar warga 33,6persen, isu keamanan 25persen, konflik Ormas 12,5persen, sengketa lahan 12,5persen, isu SARA 9,6persen, akses konflik politik 2,9persen, konflik pada institusi pendidikan 2,8persen dan kesenjangan sosial 0,9persen. Kemudian, Kementerian Sosial RI (2010), mencatat terdapat 189 daerah rawan konflik sosial yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, menurut tim peneliti dari Habibi Center, pada satu tahun terakhir ini terjadinya konflik sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konflik sosial yang bernuansa separatisme: konflik sosial di Aceh, Maluku, dan Papua;
2. Konflik sosial yang bernuansa etnis: konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Ambon;
3. Konflik sosial bernuansa ideologis: isu paham komunis, paham radikal;
4. Konflik sosial bernuansa politis: konflik akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengerusakan;
5. Konflik sosial bernuansa ekonomi: konflik

antar kelompok nelayan di selat Madura, antar kelompok preman, antar kelompok pengemudi, antar kelompok pedagang;

6. Konflik sosial lainnya: konflik antar anak sekolah, mahasiswa;
7. Konflik bernuansa solidaritas liar: tawuran antar wilayah, antar supporter sepak bola;
8. Konflik sosial issue agama atau aliran kepercayaan: isu berkaitan dengan aliran Achmaddiyah, issue aliran sesat;
9. Konflik issue kebijakan pemerintah: Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).

Fenomena konflik sosial yang tidak kunjung berhenti di Johar Baru tersebut menarik untuk diteliti dalam upaya untuk menjelaskan, mengapa rekonsiliasi konflik sosial tidak dapat diwujudkan secara permanen. Sehubungan dengan itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi akar masalah terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat, dan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan konflik sosial di Johar Baru?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi akar terjadinya konflik sosial, dan menjelaskan upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan konflik sosial di Johar Baru.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dalam usaha mendeskripsikan secara obyektif tentang konflik sosial di Johar Baru - Jakarta Pusat. Sehubungan dengan itu, sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus Forum Keserasian Sosial, unsur pemerintah (aparatur kelurahan, aparat kecamatan, instansi sosial), unsur TNI dan Polri, serta warga masyarakat di lokasi konflik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi, mempelajari bahan-bahan kepustakaan,

dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dengan pihak-pihak terkait dari unsur-unsur informan. Kemudian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis ini untuk membuat kategori data dan membuat deskripsi sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh informasi yang menjelaskan akar atau sumber konflik sosial dan upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan konflik sosial di Johar Baru.

KONFLIK SOSIAL DAN MASALAH SOSIAL

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Konflik adalah proses sosial yang di dalamnya orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Konflik juga sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan /atau kekerasan. Dengan demikian konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.

Mengacu dari pendapat di atas, konflik merupakan satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar

tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab, begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Menurut Gillin and Gillin (1987) konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan dan perilaku. Terdapat empat faktor penyebab konflik yaitu:

a. Perbedaan Antar Individu

Perbedaan yang terjadi berkaitan dengan perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang.

b. Perbedaan Kebudayaan

Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berbeda dapat menimbulkan salah pengertian, menimbulkan salah tafsir yang kemungkinan menimbulkan rasa amarah dan benci, sehingga berakibat konflik.

c. Perbedaan Kepentingan

Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dalam mempertahankan kepentingan kelompok cenderung melakukan intimidasi yang dapat menimbulkan konflik.

d. Perubahan Sosial

Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku, akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya, maka akan timbulah konflik diantara mereka.

Hasil penelitian Mu'man dkk (2004), Tumanggor (2004), Mulia Astuti (2000) yang dikutip oleh Suradi (2009) menyebutkan bahwa terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, dan intervensi kepentingan politik. Namun demikian hasil-hasil penelitian tersebut belum secara luas menyajikan informasi akar sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial. Berbagai alasan yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dengan kekerasan antar kelompok masyarakat atau konflik horizontal di beberapa daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi dan intervensi kepentingan politik. Sedangkan konflik vertikal saat ini juga semakin sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia sebagai eksekusi dari demokratisasi yang tidak terkendali.

Dikemukakan oleh Azar (Miall, Oliver and Tom, 2002) bahwa sumber-sumber terjadinya konflik sosial yang berlarut-larut karena adanya

perampasan kebutuhan manusia. Kegagalan penguasa mengatasi masalah ini memperbesar terjadinya konflik sosial yang berlarut-larut. Menurut Azar, kebutuhan keamanan, pengembangan, akses politik dan identitas (ekspresi budaya dan religius), berhubungan dengan hak dasar, untuk mencari nafkah dan kebebasan. Namun demikian terjadinya konflik sosial di masyarakat juga tidak lepas dari runtuhnya ketahanan sosial masyarakat atau lemahnya daya kapital sosial.

Kapital sosial menurut Francis Fukuyama (Lawang, 2005) lebih dimaknai sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Menurut Putman dasar pemikiran utama kapital sosial adalah jejaring kerja sosial yang berdasarkan nilai. Kapital sosial mengarah pada semua nilai kolektif jejaring kerja sosial dan inklinasi atau kecenderungan yang ditimbulkan dari jejaring kerja tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan bagi orang lain atau norma-norma resiprositas (timbal balik).

Kemudian Requena mengemukakan bahwa pentingnya kapital sosial karena membawa bersama-sama beberapa konsep sosiologi yang penting seperti dukungan sosial, integrasi dan kohesi sosial. Pandangan ini didukung oleh Rothstein yang menegaskan bahwa kekuatan nyata teori kapital sosial adalah kemampuannya untuk mengkombinasikan antara struktur historis sosiologi makro dengan mekanisme sebab akibat pada tingkat mikro yang merupakan suatu keistimewaan dalam ilmu sosial (Suradi, 2009 : 115).

Terlepas dari berbagai penyebab terjadinya konflik sosial, dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut ada dua hal yaitu dampak positif atau menguntungkan dan dampak negatif atau

merusak. Dampak Positif dari konflik meliputi : konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas di telaah; konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, meningkatkan kohesivitas hubungan-hubungan sosial dalam kelompok, meningkatkan interaksi antar individu; konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain; konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok; konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru; konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat; konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang.

Sedangkan dampak negatif dari konflik antara lain: keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, berubahnya kepribadian para individu, dan munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

PROFIL LOKASI DAN KONFLIK SOSIAL

Profil Lokasi

Lokasi penelitian tentang konflik sosial ini dilaksanakan di Kecamatan Johar Baru. Secara administratif, Kecamatan Johar Baru ini merupakan salah satu kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kota administratif Jakarta Pusat. Kemudian, secara administratif Kecamatan Johar Baru terbagi dalam empat kelurahan yaitu Kelurahan Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi dan Galur.

Kecamatan Johar Baru memiliki luas wilayah 2,38 km² yang dihuni oleh penduduk berjumlah 116.261 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 58.925 jiwa (50,68 persen) dan perempuan berjumlah 7.336 jiwa (49,32 persen). Dilihat dari luas wilayah dengan jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 48,849 jiwa/km². Dan jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, maka Kecamatan Johar Baru memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah administratif Jakarta Pusat. Masyarakat menggunakan istilah “kepengapan sosial”, untuk mendefinisikan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Johar Baru tersebut. Akibatnya muncul berbagai persoalan di wilayah ini antara lain: lingkungan kumuh, kurangnya pendidikan, anak jalanan semakin banyak, terbatasnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, bertambahnya orang miskin, dan sering terjadinya tawuran antar individu atau antar kelompok.

Di Kecamatan Johar Baru termasuk daerah yang sangat padat penduduk. Hal ini terlihat dari penataan rumah yang berdesakan, tidak adanya fasilitas pembuangan air, pembuangan sampah yang memadai, tidak tersedianya tempat bermain anak-anak, sehingga anak-anak bermain di jalanan dan masih banyak fasilitas yang tidak tersedia di daerah ini. Akibatnya penduduk buang sampah dan buah limbah disembarang tempat, anak-anak bermain di jalanan, jemuran di depan rumah, bau busuk dimana-mana dan lingkungan terlihat kotor dan kumuh. Kondisi semacam ini akan mempengaruhi derajat kesehatan warga, dan tidak ada kenyamanan di lingkungan tempat tinggal.

Pendidikan penduduk juga sangat memprihatinkan. Menurut informasi dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama,

rata-rata pendidikan masyarakat adalah lulus SD. Penduduk yang lulus SLTP jumlahnya sedikit. Tingkat pendidikan penduduk ini tidak dapat dilepaskan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak memadai. Mereka kesulitan untuk tidur dengan nyaman, apalagi untuk bisa belajar dengan baik. Akibatnya banyak anak-anak sekolah yang putus sekolah atau *drop out*, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Permasalahan berikutnya, yaitu penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan pendidikannya. Pada umumnya lowongan pekerjaan menerima tenaga kerja berpendidikan minimal SLTA. Persaingan yang cukup ketat dalam mencari pekerjaan, menyebabkan sebagian pencari kerja dari Kecamatan Johar Baru merasa tersisih. Di pihak lain, dikarenakan sering terjadi tawuran - menyebabkan perusahaan tidak bersedia menerima tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari Kecamatan Johar Baru.

Aktivitas keseharian warga masyarakat hanya kumpul-kumpul di pinggir jalan ataupun gang. Kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas. Kondisi demikian ini tentunya mudah menimbulkan atau memicu tersinggungan yang berujung terjadi tawuran antar kelompok masyarakat. Maka apabila ada anggota kelompok yang menghadapi masalah dengan kelompok lain, mereka kompak untuk menyerang kelompok lain tersebut.

Kondisi demikian itu menggambarkan lingkaran sebab akibat. Pengangguran yang tinggi, menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (miskin), tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut akan menambah jumlah pengangguran di lokasi tersebut. Kondisi tersebut merupakan faktor yang memicu terjadinya konflik sosial (tawuran)

antar kelompok masyarakat yang berlarut-larut, dan terjadi secara turun temurun.

Kepadatan penduduk merupakan masalah yang berdampak pada masalah-masalah lainnya seperti : banyaknya tempat tinggal yang sempit berupa rumah-rumah petak yang hanya dijadikan sebagai tempat tidur atau tempat istirahat saja. Tempat berkumpul, untuk dewasa di luar rumah atau di ujung gang yang memungkinkan mereka dapat duduk sebanyak 10 orang. Anak-anak hanya lalu lalang di sekitar jalan, sehingga semakin terlihat kepadatan penghuninya. Demikian juga, bagian jalan atau bagian tertentu dari rumah petak sebagai tempat mandi, mencuci dan menjemur pakaian. Penggunaannya secara bergantian dari tiap anggota rumah tangga. Ada juga kamar mandi dan kakus yang digunakan bersama-sama.

Rumah-rumah penduduk berukuran sempit, dimana rumah tersebut berfungsi sebagai dapur/ tempat memasak, tempat makan, ruang tidur dan tempat menyimpan barang-barang rumah tangga lainnya, seperti peralatan dapur, pakaian dan lain-lain sehingga terkesan pengap dan kumuh. Bahkan menurut informasi dari tokoh masyarakat terdapat rumah petak yang sempit dihuni oleh dua keluarga, sehingga jumlah anggota yang tinggal di rumah tersebut cukup banyak. Akibatnya tidurnya susah, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk istirahat adalah bergantian tidur. Orang tua dan anak-anak kecil tidur di dalam rumah, sedang anak remajanya begadang larut malam hingga menjelang pagi hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang tua dan anak-anak yang masih kecil. Pagi harinya orang tua dan anak-anak sudah bangun, para remaja pulang ke rumah untuk bergantian tidur. Kondisi masyarakat sedemikian rupa, sehingga di daerah ini tidak pernah sepi.

Gambaran Konflik Sosial

1. Ekspresi Konflik Sosial

Konflik di Kecamatan Johar Baru berbentuk konflik terbuka. Kejadian tawuran antar warga berlangsung secara terbuka dan saling menunjukkan sikap dan tindakan pertentangan antar kelompok masyarakat. Waktu berlangsungnya tawuran tidak menentu, atau tawuran terjadi sewaktu-waktu, siang atau malam. Antar kelompok masyarakat yang berkonflik saling menyerang dengan menggunakan batu, kayu, parang dan benda lainnya. Ketika saling berhadapan pada jarak dekat, mereka saling mencaci maki dengan kata-kata kotor dan jorok yang mengundang kebencian dan memancing kemarahan. Ketika berhadapan secara jarak jauh, maka antar kelompok menggunakan katapel isinya batu dan benda-benda lain yang ada.

Teknik tawuran maju mundur, secara tiba-tiba ada memberi komando menyuruh mundur, sehingga pasti satu kelompok mundur. Sebaliknya lawan akan maju menyerang dan seterusnya. Teknik ini tergantung dari jumlah anggota kelompok, biasanya kelompok yang lebih banyak cenderung melakukan serangan terus menerus atau menekan lawan. Tetapi tidak sampai memasuki wilayah lawan dan hanya bertahan di wilayah masing-masing. Keadaan demikian ada yang melaporkan dari intel kepolisian dan akan datang ke lokasi tawuran dengan membawa beberapa personil. Paling sedikit dua truk polisi masing-masing berjumlah sekitar 30 orang.

Kejadian tawuran di siang hari mendorong remaja pengangguran untuk mengumpulkan kelompoknya dengan peralatan yang diperlukan. Situasi siang hari dirasa aman untuk tawuran, karena pada saat itu tokoh masyarakat pergi

bekerja. Mereka tidak menghiraukan aparat keamanan dari Polsek yang sewaktu-waktu datang ke lokasi tawuran. Menurut mereka, letak Polsek Johar Baru yang jauh dari lokasi tawuran, memberikan kesempatan tawuran berlangsung lama. Letak Kantor Polsek Johar Baru berada di Kelurahan Tanah Tinggi atau tepatnya di daerah Pulo Gundul. Apabila tawuran terjadi antar kelompok warga Galur dengan warga Kampung Rawa, maka memerlukan waktu cukup lama karena letak Polsek dengan lokasi tawuran sekitar lima kilometer. Polsek harus mengumpulkan aparat di kesatuannya, atau memerlukan bantuan dari Polres Jakarta Pusat sambil menunggu aparat kecamatan atau kelurahan untuk berkoordinasi.

Ketika aparat keamanan dan aparat pemerintah tiba di lokasi, kelompok tawuran membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing. Kurang lebih selama tiga jam suasana terlihat tenang seperti tidak terjadi tawuran. Aparat keamanan dan pemerintah akan menutup jalan sementara dan meminta warga atau tokoh masyarakat membersihkan jalanan dari batu atau benda-benda lain yang digunakan tawuran. Mengumpulkan tokoh masyarakat pada siang hari tentu kesulitan, karena pada umumnya mereka bekerja atau keluar rumah. Biasanya setelah terjadi tawuran, aparat keamanan dan warga masyarakat dalam waktu tiga hari tiga malam berjaga di lokasi. Ketika situasi sudah dianggap reda, maka penjagaan tidak dilakukan lagi. Aparat keamanan yang berjaga kembali ke kesatuannya, dan aparat setempat beserta tokoh masyarakat melakukan pemantauan.

Proses tawuran terjadi secara situasional karena akar masalahnya kurang jelas. Keterangan ini diperoleh dari tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Pihak

atau kelompok yang melakukan tawuran, belum pernah secara pasti berkaitan dengan penyebab tawuran. Paling-paling isu yang berkembang dan ditanggapi secara spontan, sehingga karena solidaritas yang tinggi – bisa saja serta merta pecah tawuran. Atau hanya ada seseorang yang mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata apa saja yang dianggap menyinggung. Kalau semuanya diadukan dalam kelompok, maka bisa saja dan kapan saja tawuran akan terjadi.

Tawuran terjadi biasanya akhir pekan yaitu Jumat sore atau hari Sabtu. Kedua hari tersebut merupakan hari libur sekolah dan libur kerja, sehingga warga lebih banyak di rumah atau berkeliaran. Hal-hal yang sepele bisa saja memicu tawuran. Sedangkan hari Senin sampai dengan Jumat siang, dianggap hari sibuk karena banyak bekerja dan sekolah, warga berkurang dan melakukan kegiatan masing-masing. Hari-hari tersebut dianggap waktu sibuk, sehingga tidak sempat berpikir lainnya. Oleh karena itu, tawuran muncul lebih disebabkan faktor yang tidak jelas dengan isu yang sepele dan cenderung anarkis. Misalnya, ada yang memulai dengan kata-kata jorok dan saling mengejek, dan merasa tersinggung dan marah.

Hasil pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi tidak ada sentimen kedaerahan atau bernuansa SARA. Pelaku tawuran diketahui lokasi tempat tinggalnya, terlihat dari pengelompokannya dan wilayah sembunyi. Tetapi kelompoknya tidak formal karena tidak ada pengurus secara resmi, tidak diketahui jumlah anggotanya, tidak ada aturan, nama kelompok hanya pengakuan dan cenderung sepihak saja. Warga terdiri dari beragam agama, tidak ada perusakan tempat ibadah. Warga terdiri dari berbagai

suku bangsa, tidak ada sentimen terhadap suku bangsa tertentu.

Konflik antar warga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru sudah berlangsung lama dan masyarakat tidak berdaya untuk mencegahnya. Konflik terjadi hampir setiap saat, bahkan bisa dipastikan dalam waktu satu minggu terjadi konflik. Menurut informasi dari tokoh masyarakat setiap malam Sabtu dan malam Minggu pasti terjadi tawuran. Kejadian tersebut disebutkan sudah membudaya karena tawuran terjadi secara terus menerus.

Masyarakat sudah merasa kesal, bosan dan masa bodoh dengan seringnya tawuran. Upaya penanganan sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui musyawarah antar warga, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Juga dilakukan melalui pendekatan keamanan, terutama yang ditangani Kepolisian Sektor Johar Baru. Tetapi tawuran tetap saja terjadi, dan masyarakat mengatakan tiada hari tanpa tawuran. Aparat juga sudah “kehilangan akal” untuk mengatasi tawuran di Kecamatan Johar Baru. Setiap ada tawuran dan dapat ditangani, tidak lama kemudian terjadi tawuran lagi di tempat yang berbeda.

Menurut informasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyebab utama terjadinya tawuran hanya masalah sepele. Secara pasti tidak diketahui siapa yang memulai dan apa penyebabnya karena tiba-tiba sudah terjadi tawuran. Seperti penuturan tokoh pada waktu berlangsungnya diskusi :

“pada waktu itu , hari sabtu, tanggalnya saya lupa pak, kami lagi duduk santai ngobrol dengan bapak-bapak yang lain, tiba-tiba ada dua anak muda sambil naik motor mengejek anak-anak yang lagi nongkrong di pinggir

jalan. Tidak berapa lama sekelompok anak muda langsung menyerang dengan membawa batu, kayu dan peralatan lainnya kepada anak-anak yang lagi nongkrong. Usut punya usut ternyata anak yang naik motor pada waktu melintas di sekelompok anak yang lagi nongkrong, diejek dan dikatain dengan kata-kata kasar. Mendengar keributan, anak-anak muda dari kelompok masing-masing ikut-ikutan tawuran, dan sebagian lagi menghindar atau menjauh”.

Pola tawuran yang terjadi di Kecamatan Johar Baru umumnya antar kelompok lingkungan penghuni yang berdekatan atau berseberangan jalan. Peta tawuran sebagai berikut:

- a. Dalam wilayah Kecamatan Johar Baru, tiga kelurahan yaitu; Kampung Rawa, Johar Baru, Tanah Tinggi, dan Galur. Tawuran yang terjadi antara warga Kampung Rawa dengan warga Kelurahan Johar Baru, warga Kelurahan Johar Baru dengan warga Kelurahan Tanah Tinggi, warga Kelurahan Galur dengan warga Kelurahan Kampung Rawa. Tiga kelurahan yang disebutkan terdahulu letaknya saling berdekatan. Kecuali warga Kelurahan Johar Baru dengan Kelurahan Galur tidak pernah terjadi karena ditengahnya berada Kelurahan Kampung Rawa. Atau Kelurahan Johar Baru dengan Kelurahan Tanah Tinggi tidak pernah terjadi tawura karena di tengahnya ada Kelurahan Kampung Rawa.
- b. Jika diperhatikan peta wilayah pembatas jalan protokol Jalan Suprpto, maka Kecamatan Johar Baru ada di bagian selatan, Kecamatan Kemayoran berada di bagian utara, dan Kecamatan Cempaka Putih di bagian timur. Tawuran terjadi antar warga Kelurahan Galur dengan warga Cempaka Putih Barat yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Warga Galur dengan warga Kelurahan Harapan Mulya yang

termasuk dalam wilayah Kecamatan Kemayoran. Tawuran warga Kelurahan Tanah Tinggi dengan warga Kelurahan Bungur yang termasuk wilayah Kecamatan Senen (Musni Umar; 2011).

Terdapat beberapa lokasi yang berpotensi menjadi lokasi tawuran antar kelompok masyarakat, yaitu :

- a. Jalan Rawa Sawah IV Pertigaan Gang T, perbatasan RW 03 Kelurahan Kampung Rawa dengan warga RW 02 Kelurahan Johar Baru,
- b. Jalan Kramat Jaya Baru, perbatasan RW 01 Kelurahan Johar Baru dengan warga RW 08 Kelurahan Johar Baru,
- c. Jalan Kramat Sentiong Lintasan kereta api, perbatasan antara RW 08 Kelurahan Johar baru dengan warga RW 010 Kelurahan Tanah Tinggi,
- d. Pertigaan antara Jalan Tanah Tinggi IV RW 07 Kelurahan tanah Tinggi dengan warga yang tinggal di Jalan Tanah Tinggi XII, khususnya RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi,
- e. Jalan Kramat Gundul samping SMK Jalan Jembatan Besi, Johar Baru, antara warga RW 09 Kelurahan Tanah Tinggi (14 RT) dengan warga RW 013 Kelurahan Tanah Tinggi (16 RT),
- f. Perempatan Jalan Baladewa dan Kota Paris warga RW 011 Kelurahan Tanah Tinggi dengan warga RW 05 Kelurahan Tanah Tinggi
- g. Depan Mesjid Nur Aeni, Jalan Rawa Sawah III RW 02 Kelurahan Kampung Rawa dengan warga RW 03 Kelurahan Kampung Rawa
- h. Jalan Galur Jaya Pertigaan Pasar Gembrong, khususnya warga RW 03 Kelurahan Galur dengan warga RW 06 Kelurahan Kampung Rawa,
- i. Jalan Rawa Tengah Perbatasan

Pondokan Jawa, khususnya warga RW 07 Kelurahan Galur dengan warga RW 01 Cempaka Putih Barat,

- j. Jalan Tanah Tinggi Rel Kereta Api, warga RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi dengan warga Kelurahan Bungur Kecamatan Senen,
- k. Pertigaan Pangkalan Asem perbatasan Rawa Tengah, khususnya warga RW 07 Kelurahan Galur dan Warga Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran.

Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Johar Baru, antara lain pada uraian berikut ini:

- a. Pada tanggal 3 Agustus 2011

Tawuran di RT 013 Kelurahan Johar Baru yang terjadi sebanyak tiga kali dalam semalam. Pada tawuran tersebut yang menjadi sasaran pengrusakan adalah rumah ketua RT 013 (rumah Rusman). Penyebabnya adalah ujung jalan tempat mereka bermain bola dipasang tanggul/polisi tidur, sehingga mereka marah karena tidak bisa bermain bola lagi.

- b. Tanggal 7 Agustus 2011, pukul 02.00.

Dua provokator dari kota Paris ditangkap oleh warga yang sedang ronda. Setelah diselidiki ternyata mereka membawa geer dan samurai. Pada malam itu, geng dari Johar Baru yang ditemui sedang bergerombol dipintu gang. Mereka mengatakan dengan tegas kalau diprovokasi, maka akan bersama-sama membalasnya. Namun demikian, konflik sosial dapat dicegah oleh aparat pengamanan lingkungan dari RW. Dua provokator ditahan dan diserahkan ke polisi.

2. Sumber Konflik

Terdapat beberapa persoalan yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial

di Kecamatan Johar Baru, yaitu banyaknya pengangguran, lingkungan kumuh, pendidikan dan masalah sosial lainnya. Tetapi persoalan tersebut hanya eksek dari persoalan pokok atau akar masalah yang tidak terlihat atau muncul dipermukaan. Bila mencermati terjadinya konflik di Kecamatan Johar Baru, kepadatan penduduk dan kemiskinan merupakan dua kondisi yang menjadi akar atau pemicunya. Tetapi kedua kondisi tersebut juga merupakan sebab akibat yang menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan analisis situasi, ada enam sumber konflik di Kecamatan Johar Baru, yaitu:

a. Tempat Tinggal

Berasal dari pernyataan seorang tokoh masyarakat dan pengamatan peneliti, banyak tempat tinggal yang sempit, tidak beraturan, berjubel dan hanya dijadikan sebagai tempat istirahat. Rumah yang sempit berfungsi sebagai dapur tempat memasak, tempat makan, ruang tidur dan tempat menyimpan barang-barang rumah tangga lainnya, seperti peralatan dapur, pakaian dan lain-lain sehingga terkesan pengap dan kumuh. Bahkan menurut informasi dari tokoh masyarakat terdapat rumah petak yang sempit dihuni oleh dua keluarga, sehingga jumlah anggota yang tinggal di rumah tersebut cukup banyak. Akibatnya mau tidurpun susah, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk istirahat adalah bergantian tidur. Orang tua dan anak kecil tidur di dalam rumah, sedang anak remaja dan orang dewasa begadang diluar rumah, di gang-gang yang memungkinkan dapat duduk-duduk sambil ngobrol hingga larut malam menjelang pagi hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada

orang tua dan anak-anak yang masih kecil. Pagi harinya orang tua dan anak-anak bangun, para remaja pulang kerumah untuk bergantian tidur. Kondisi masyarakat sedemikian rupa, sehingga di daerah ini tidak pernah sepi dari keramaian.

b. Lingkungan Kumuh

Hasil pengamatan di lapangan, Kecamatan Johar Baru sangat padat penduduknya. Hal ini terlihat dari penataan rumah yang berdesakan, tidak adanya fasilitas pembuangan air, sampah yang memadai, tidak tersedianya tempat bermain anak-anak, sehingga anak-anak bermain di jalanan dan masih banyak fasilitas yang tidak tersedia di daerah ini. Akibatnya penduduk membuang sampah dan limbah buah-buahan di sembarang tempat, anak-anak bermain di jalanan, jemuran bergelantungan di depan rumah, bau busuk dimana-mana dan lingkungan terlihat semrawut, kotor dan kumuh. Kondisi semacam ini jelas membuat kesehatan warga terganggu dan tidak ada kenyamanan di lingkungan tempat tinggal.

c. Pendidikan

Masalah pendidikan di wilayah ini sangat memprihatinkan. Menurut informasi dari berbagai pihak yaitu; tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rata-rata pendidikan masyarakat di daerah ini adalah lulus SD, dan lulus SLTP jumlahnya sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari. Melihat kenyataan seperti ini tingkat pendidikan masyarakat di daerah ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak memadai. Tidur saja tidak memungkinkan, apalagi untuk bisa belajar dengan baik, akibatnya banyak para pelajar yang putus sekolah.

Banyaknya remaja yang putus sekolah menambah jumlah pengangguran.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Tidak hanya di Kecamatan Johar Baru saja masalah sulitnya mencari pekerjaan, tetapi secara umum lapangan pekerjaan memang terbatas dibanding dengan pencari kerja. Bila dicermati, perusahaan ataupun kantor-kantor yang ada lowongan pekerjaan menentukan persyaratan salah satunya pendidikan. Ukuran sekarang ini pada umumnya lowongan pekerjaan menerima tenaga kerja pendidikan minimal lulus SLTA. Bila dikaitkan pada waktu mengadakan diskusi kelompok terarah atau FGD. Keterangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kelurahan dan peserta lainnya mengatakan, bahwa pendidikan anak-anak di Kecamatan Johar Baru pada umumnya rendah hanya lulus SD, yang lulus SLTP dan SLTA bisa dihitung dengan jari. Dengan kondisi yang demikian akhirnya mereka banyak yang tidak bekerja alias menganggur. Keadaan seperti ini menjadikan suasana daerah tersebut menjadi panas, pengap, sehingga bila terjadi benturan sedikitpun berkembang menjadi tawuran massal. Seringnya dilanda tawuran menjadikan banyak perusahaan enggan untuk menerima tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari Kecamatan Johar Baru.

e. Pengangguran

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa di Kecamatan Johar Baru banyak remaja putus sekolah. Rata-rata pendidikan para remaja disini hanya lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi, dalam keseharian aktivitasnya hanya kumpul-kumpul, nongkrong di pinggir jalan ataupun gang. Kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas, karena memang

mereka tidak bekerja alias menganggur. Lapangan pekerjaan terbatas, sedangkan tenaga kerja melimpah. Persaingan cukup ketat, sehingga dalam kompetisi mencari pekerjaanpun selalu tersisih dalam pendidikan. Kondisi yang demikian nampaknya mudah sekali tersinggung bila terjadi ketidakcocokan atau gesekan. Ditambah lagi dengan istilah senasib sepenanggungan. Mereka mempunyai solidaritas yang cukup tinggi, sehingga bila ada masalah sedikit muncul kekompakan diantara mereka untuk bersatu menyerang lawan.

f. Kemiskinan

Kemiskinan yang turun temurun ini merupakan lingkaran sebab akibat dari suatu persoalan, menimbulkan persoalan baru. Bila kita lihat kenyataan dilapangan, kondisi rumah sempit mengakibatkan anak sulit untuk belajar. Belum lagi kondisi orang tuanya dengan pendapatannya tidak menentu karena pekerjaannya serabutan berakibat pada pembiayaan pendidikan anaknya. Pendidikan anaknya yang rendah berakibat sulitnya mencari pekerjaan. Akibatnya pengangguran makin bertambah. Lingkaran sebab akibat inilah yang menjadikan kemiskinan turun temurun pada generasi berikutnya.

Dengan berbagai keterbatasan, baik menyangkut sarana prasarana, tingkat pendidikan, lapangan kerja dan keterbatasan lainnya berdampak pada masa depan yang tidak jelas. Secara alamiah dengan kondisi yang demikian mudah sekali untuk terjadi tawuran. Apalagi dengan tidak adanya aktivitas yang jelas, seringkali kumpul-kumpul sampai larut malam dapat mendorong mereka untuk memunculkan identitas diri dengan membentuk kelompok-kelompok atau geng.

Dilokasi penelitian teridentifikasi ada 22 geng (kelompok) yaitu: Geng Bengal, Salah Dikit Golok (Sadigo), Bocah Plin-Plan (Caplin), Golongan Dayak (Golday), Lelaki Poyah-Poyah (Lepoy), Bocah Nekat Kampung Rawa (Bonekar), Rawa Selatan (Rasela), Kumuh dan Miskin (Kumis), Anak Muda Kampung Rawa (Amuka), Batak Nekat Cari Ribut (Banecar), Masa Depan Suram (Madesu), Bocah Cilik Resah (Bocires), Geng Boltacus, Geng Gemselu, Geng Gempal, Geng Bodreks, Kota Paris (Kopar), Bocah Cilik Cari Gara-Gara (Bocigara), Gang Pantai, Dua Delapan (Dupan), Satu Lima Enam (Salinem), dan Anak Sepuluh (Ansepu). Kelompok tersebut yang dianggap sering melakukan tawuran. Namun, tidak semuanya benar karena ada kelompok yang hanya menamakan dirinya berdasarkan sekolah, lokasi atau nama gang/lorong.

3. Pemicu Konflik

Berdasarkan informasi lapangan dan hasil diskusi kelompok, penyebab terjadinya konflik di Kecamatan Johar Baru belum diperoleh jawaban yang pasti. Menurut tokoh pemuda, penyebab konflik hanya masalah sederhana, seperti saling mengejek, saling pandang, dan masalah wanita yang pada awalnya bersifat individual. Tetapi karena mereka mempunyai kelompok, maka kemudian antar mereka saling cerita, maka persoalan menjadi meluas. Disinilah awal mula terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat yang berkepanjangan. Kemudian dikemukakan oleh tokoh masyarakat setempat, penyebab lain seperti rebutan lahan usaha, sarana sosial yang terbatas dan kepadatan penduduk yang memicu terjadinya perselisihan. Menurut tokoh agama, sumber atau penyebab

terjadinya konflik sosial adalah pengaruh narkoba, pengangguran dan ciri khas atau sudah menjadi karakter warga masyarakat Johar Baru. Kemudian menurut petugas dari Dinas Sosial DKI Jakarta dan Ketua Forum Kereserian Sosial, akar masalah terjadinya konflik sosial atau tawuran antar kelompok masyarakat adalah masalah kemiskinan, banyaknya pengangguran. Adanya tuntutan perut (kebutuhan pangan) yang tidak bisa ditunda-tunda, yang menyebabkan seseorang menjadi mudah tersinggung.

Konflik sosial antar kelompok masyarakat di Kecamatan Johar Baru sangat kompleks. Selain informasi yang disampaikan informan terdahulu, beberapa kondisi dan situasi yang merupakan faktor penyebab terjadinya konflik sosial, yaitu sarana dan prasarana sosial yang terbatas, permukiman yang sempit, terbatasnya ruang pertemuan warga, kepadatan penduduk, fasilitas sosial terbatas, pendidikan sebagian besar penduduk yang rendah, pengangguran, peran orang tua dalam memicu konflik sosial, solidaritas sosial yang rendah, adanya provokator, kemiskinan, geng, miras dan narkoba, aspirasi yang tidak tersalurkan, mencari identitas diri dan kebanggaan kelompok, dan adanya tempat untuk berlangsungnya tawuran. Berbagai faktor tersebut perlu pendalaman melalui penelitian tersendiri.

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Konflik sosial antar kelompok masyarakat di Kecamatan Johar Baru sudah berlangsung lama, dan masyarakat tidak berdaya untuk mencegahnya. Upaya penanganan sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui musyawarah antar warga, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tetapi konflik tetap saja terjadi, dan bisa dipastikan dalam

waktu satu minggu terjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat.

Upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan untuk menangani konflik sosial di Kecamatan Johar Baru adalah:

1. Pendekatan keamanan

Penanganan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru dengan pendekatan keamanan dilakukan melalui Kepolisian Sektor Johar Baru. Namun demikian, upaya dari pihak kepolisian tersebut tidak membawa hasil dan tawuran terus terjadi. Karena itu, warga masyarakat mengatakan tiada hari tanpa tawuran. Aparat sudah “kehilangan akal” untuk mengatasi persoalan tawuran di Kecamatan Johar Baru.

2. Pendekatan Sosial

Penanganan konflik sosial dengan pendekatan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yang melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dosen, masyarakat peduli, dan dunia usaha. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan outbond yang dimaksudkan agar mereka saling mengenal, saling bergotong royong, saling kerjasama saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai warga masyarakat. Pada waktu kegiatan outbond berlangsung sampai akhir kegiatan, tidak terlihat adanya permusuhan. Tetapi setelah mereka kembali ke tempat asal dan masuk di dalam kelompok masing-masing, tidak berapa lama terjadi tawuran.

3. Pendekatan Ekonomi

Penanganan konflik dengan pendekatan ekonomi melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam bentuk pelatihan menjahit, sablon, perbaikan Air Condition (AC) dan Hand Phone (HP). Selanjutnya

dibentuk beberapa forum dalam rangka mengantisipasi tawuran, seperti : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA). Namun demikian, tetap saja tawuran terulang kembali sampai sekarang.

4. Pendekatan Pekerjaan Sosial

Kementerian Sosial RI dengan Program Keserasian Sosial mencoba membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*Lively hood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan dan solidaritas). Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka (Kemensos, 2010).

Kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Sosial dalam menangani konflik sosial diarahkan pada penciptaan rasa kebersamaan, sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, menciptakan ketenteraman dan kedamaian melalui kegiatan gotong royong dengan membuat taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot penghijauan, perbaikan sarana olah raga, pembuatan taman, membentuk kelompok musik, dan pembuatan tugu perdamaian. Melalui pendekatan “*community based* sosial disaster risk management“, diharapkan dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Namun

demikian, tidak berapa lama setelah program dilaksanakan, konflik sosial antara kelompok masyarakat terjadi kembali.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut belum memberikan hasil dalam mengatasi konflik sosial secara permanen. Ada berbagai situasi dan kondisi yang dapat dipandang sebagai faktor yang kurang mendukung upaya penanganan konflik sosial antar kelompok masyarakat di Kecamatan Johar Baru, yaitu :

1. Penanganan konflik sosial yang dilakukan pemerintah masih mengedepankan ego sektoral. Dimana terlihat jelas bahwa masing-masing kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Penanganan konflik yang bersifat sektoral tercermin pada belum ditetapkannya secara jelas dan komprehensif tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (*preventif*), maupun penanganan pada saat, dan sesudah konflik (*recovery*). Peraturan bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang sistematis dan terukur.
2. Langkah-langkah yang diambil didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan keraguan pada masing-masing institusi, karena setiap institusi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda.
3. Penanganan konflik sosial tidak didasari hasil kajian, sehingga penanganannya tidak mendasar dan tidak terfokus pada akar masalah, dan sebaliknya hanya menyentuh persoalan yang tampak dipermukaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Johar Baru, merupakan konflik sosial atau tawuran antar kelompok masyarakat yang

bentuknya terbuka. Artinya, masing-masing pihak menunjukkan sikap dan tindakan pertentangan antar kelompok. Waktu terjadinya tawuran tidak tentu atau terjadi sewaktu-waktu, bisa siang atau malam, dan dapat dipastikan setiap seminggu sekali terjadi tawuran.

Penyebab terjadinya tawuran sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti. Dari hal-hal yang sederhana, seperti saling ejek, saling pandang, dan masalah wanita serta dimulai dari persoalan yang bersifat individual. Selain berawal dari masalah individual, rebutan lahan usaha, pengaruh narkoba, dan pengangguran, merupakan kondisi yang memicu terjadinya konflik sosial. Penanganan dilakukan melalui pendekatan keamanan, sosial, ekonomi dan pekerjaan sosial. Namun demikian hasilnya belum efektif, tawuran terus terjadi sampai sekarang.

Dari uraian tersebut, perlu ditempuh langkah-langkah untuk mengatasi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru :

1. Perlu penataan lingkungan, agar lingkungan terlihat indah, rapi, sehat dan tidak kumuh, melalui kerjasama antara Pusat (Kementerian Sosial RI), dengan Kementerian terkait lainnya, dan Pemda DKI Jakarta serta lembaga-lembaga non pemerintah. Melalui kerjasama lintas sektor diharapkan persoalan kerawanan sosial dapat ditangani dengan baik dan efektif.
2. Mengoptimalkan forum-forum yang sudah ada melalui kegiatan guna memperkuat keserasian sosial antar kelompok masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, seperti: Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, *Family Care Unit* dan kelompok-kelompok sosial yang ada di lokasi.

4. Pemindahan penduduk melalui program transmigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Ibu Kota Jakarta. Untuk melakukan hal ini perlu kerjasama dengan Kementerian dan atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z, (2002). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pancur Siwah.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, (2006). *Panduan Kegiatan Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2011). *Pemetaan Daerah Konflik Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012a). *Indikator Keserasian Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012b). *Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. (2012c). *Indikator Keserasian Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Dunn, W. N. (1972). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
- Dwiyanto, A.dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Ismail, N. (2011). *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung; Lubuk Agung.
- Lawang, R.M.Z. (2005). *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyono, A. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuryana, M.dkk. (2005). *Rekonsiliasi Konflik Sosial*, Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI.
- Pruitt, D.G, & Jeffrey Z.R. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Jogjakarta; Pustaka Remaja.
- Sihbudi, R. (2001). *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di Ac*.
- Soerjono, S. (1987). *Sosiologi. Suatu Pengantar*: Jakarta; Rajawali Press.
- Sumodiningrat, G. & Agustian, A.G. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara*. Jakarta; Arga.
- Suradi, (2009). *Masalah Sosial Dan Kesejahteraan Sosial jilid 1*, Jakarta: P3KS Press.
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Wibawa, S. dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.